**RISALAH RAPAT**

./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perihal | : | Rapat Perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batubara |
| Hari, tanggal | : | Senin, 21 Juni 2021 |
| Waktu | : | 13.00 WIB – 16.00 WIB |
| Tempat | : | Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Tanjung Gading |
| Pimpinan | : | Asisten II dan Asisten III Kabupaten Batubara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar |
| Peserta | : | Terlampir Daftar Hadir |

1. **Tujuan**
   * + 1. Merencanakan program kerja d.r. penyusunan *roadmap* ETPD Kabupaten Batubara 2021-2025
       2. Mensosialisasikan Program perluasan ETPD dan kebijakan pemerintah dalam mendorong ETPD di daerah
2. **Hasil Pembahasan**
3. Rapat dibuka oleh Asisten II Kabupaten Batubara Bp. Sahala Nainggolan dengan menyampaikan arahan sebagai berikut :

* Kegiatan ini dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Bupati Kabupaten Batubara saat pelantikan TP2DD, yang salah satunya agar seluruh anggota dapat melakukan percepatan dalam perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
* Jajaran pimpinan akan mendukung penuh dalam program ETPD dan pertemuan ini bermanfaatan atau mendapatkan hasil.

1. Pembahasan didahulu dengan pemaparan perkembangan ETPD/TP2DD dan tahapan penyusunan roadmap ETPD 2021 – 2025 oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar.
2. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut :
3. Perlu adanya penyusunan Juknis tentang perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang berisi tentang langkah-langkah dalam menontunaikan transaksi agar menjadi panduan bagi seluruh OPD.
4. Mengoptimalkan CMS dimasing-masing OPD agar transaksi belanja sepenuhnya dilakukan secara non tunai.
5. Implementasi QRIS pada transaksi retribusi akan dilakukan secara bertahap dengan melakukan demplot seperti: Retribusi Pelayanan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, melakukan percontohan pembayaran retribusi melalui QRIS dibeberapa lokasi, salah satunya Perumahan Lima Puluh. DISHUB akan bekerjasama dengan BUMD melakukan implementasi retribusi Parkir dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Dinas Koperindag melakukan percontohan pembayaran melalui QRIS pada pembayaran retribusi pasar contohnya pada pasar delima indrapura.
6. Target Implementasi pada Retribusi Pelayanan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Juli dengan tahap awal dilakukan sosialisasi pada akhir Juni 2021, sedangkan retribusi parkir dan PKB pada Dinas Perhubungan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Bank Sumut pada kesempatan pertama.
7. Dinas KOPERINDAG akan segera mengimplementasikan retribusi pasar non tunai di Pasar Delima Indrapura.
8. Tanggapan lain :

* Bank Sumut ; Transaksi QRIS diperuntukan pada transaksi retail dengan maksimal sebesar Rp 5 Juta pertransaksi sedangkan untuk transaksi lain dapat digunakan kanal pembayaran lain seperti mobile banking, ATM, EDC dan ecommerce.
* Dinas KOMINFO : agar memastikan adanya rekening, memastikan infrastruktur jaringan, mendorong Aparatur-apartur Desa menggunakan non tunai.
* BAPPEDA : Kegiatan-kegiatan dalam perluasan ETPD yang membutuhkan dana harus segera diajukan oleh masing-masing OPD agar implementasi ETPD dapat berjalan sesuai rencana.
* Kabag Perekonomian: Implementasi non tunai disertai payung hukum untuk memitigasi risiko hukum pada kemudian hari, sekaligus payung hukum yang diperlukan dalam keperluan Anggaran
* Bank Indonesia : Implementasi Digitalisasi diperlukan tahapan dan proses, tahap pertama non tunai sebagai alternatif sehingga masyarakat tetap bisa menggunakan tunai sambil membentuk kebiasaan, kedua zonasisasi implementasi transaksi non tunai karena akseptansi masyarakat berbeda-beda maka diperlukan tahapan-tahapan tersebut dan harus telihat progresnya. Selain itu, Pemanfaatan kanal pembayaran sangat variatif, salah satunya penggunaan QRIS dan masih banyak beberapa kanal non tunai lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1. Rapat ditutup oleh Arahan Asisten III dengan beberapa arahan sebagai berikut :

* Agar setiap OPD berkomitmen untuk melakukan percepatan ETPD dan melaksanakan kesepekatan pada rapat perdana ini.
* Agar setiap rapat berkaitan dengan TP2DD dapat hadir secara langsung tanpa diwakilkan kecuali berhalangan dengan kegiatan lain yang lebih penting.
* Pedoman kepada OPD berupa Juknis untuk masing-masing OPD dapat disusun oleh BPPRD.
* Perlu adanya studi banding ke daerah lain agar mendapatkan masukan jika diperlukan melakukan ATM (amati Tiru dan Modifikasi).

1. **Penutup dan Tindaklanjut**
2. Penyusunan *roadmap* dilakukan untuk menjadi panduan dalam memperluas ETPD di Kabupaten Batubara. Selanjutnya akan disusun panduan dalam bentuk Juknis untuk ditujukan kepada masing-masing OPD dengan langkah awal yang dilakukan meliputi :
   1. Digitalisasi berdasarkan Zona tertentu, misalnya parkir pada zona tertentu atau retribusi sampah pada pihak tertentu (Pabrik/Toko/Usaha besar lainnya)
   2. Pembayaran non tunai sebagai alternative pembayaran secara bertahap setelah masyarakat mulai terbiasa non tunai maka penerapan pembayaran non tunai secara keseluruhan mulai diterapkan.
3. Percepatan ETPD dilakukan secara bertahap untuk membentuk kebiasaan masyarakat dan menyesuaikan akseptansi masyarakat di masing-masing kabupaten di Batubara.
4. Perlu adanya studi banding di daerah lain untuk mendapatkan masukan dalam perluasan ETPD di Kabupaten Batubara.
5. Dalam implementasi non tunai perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat dan metode lainnya.
6. Perluasan ETPD Kabupaten Batubara akan dilakukan hingga aparatur Desa dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur yang tersedia.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Tanjung Gading, 21 Juni 2021

Notulen,

Mei Linda Suryanti Lubis

Sekretaris BPPRD

Pimpinan Rapat,

Rijali S.Pd

Kepala BPPRD

Mengetahui/Menyetujui

Asisten II Asisten III